

Pertemuan Ke : 10
GEPOLITIK



IBI20206
KEWARGANEGARAAN



TUJUAN PEMBELAJARAN



Membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya geopolitik sebagai upaya memperkuat wawasan kebangsaan, agar mahasiswa memiliki semangat patriotisme dan bela negara yang tinggi

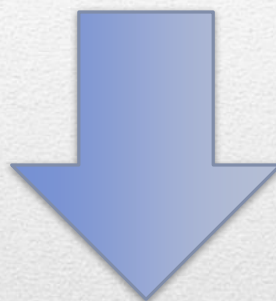


Outcomes Proses Pembelajaran

Taxonomi Bloom	Outcomes
Memorizing	Mahasiswa memiliki pengetahuan mendasar tentang geopolitik sebagai upaya memperkuat wawasan kebangsaan.
Comprehension	Mahasiswa memiliki pemahaman dan sikap yang benar tentang penerapan geopolitik negara, serta memiliki daya kritis terhadap konsep geopolitik Indonesia.
Application	Mahasiswa memiliki semangat bela negara yang berlandaskan geopolitik negaranya, serta mengimplementasikan Wawasan Nusantara dengan benar.



Geopolitik



Sistem dan kebijakan politik yang didasarkan pada pertimbangan geografis



Pengertian GEOPOLITIK Secara Umum



Cara Pandang dan Sikap Bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud Negara Kepulauan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945



Pengertian GEOPOLITIK

- ✓ Secara Etimologi berasal dari kata **geo** yang berarti **bumi** yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195).
 - ✓ Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
-



Pengertian Geopolitik Bagi Para Ahli

Friedrich Ratzel
(1844 – 1904)
Teori Ruang

“bangsa berbudaya hendak memerlukan sumber energi manusia yang besar serta kesimpulannya menekan daerah primitif bangsa”.

“negara merupakan entitas politik secara totalitas dan unit biologis dengan kecerdasan”

Rudolf Kjellen
(1864 – 1922)
teori Kekuatan

Karl Haushofer
(1869– 1946)
teori Pan Region

ditemukan dasarnya dunia bisa dipecah menjadi 4 wilayah benua (wilayah pan) serta dipimpin oleh negeri unggul.



MANFAAT DARI KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA



1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
 2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah teritorial dan landas kontinen Indonesia.
 3. Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia
 4. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
-



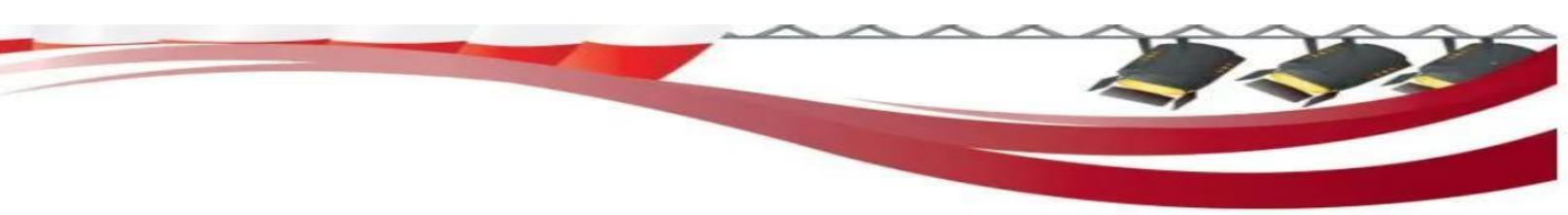
KONSEP GEOPOLITIK

Teori Geopolitik pertama diperkenalkan oleh Ir. Soerkarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI

Bagi Indonesia, kepentingan nasional yang paling dasar adalah persatuan dan kesatuan, identitas/jati diri bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara



Dengan tersendirinya, bangsa Indonesia tidak memakai konsep Geopolitik teori tentang adu kekuasaan dan kekuatan. Tetapi, Indonesia memilih bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional yg dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik Indonesia



Kehidupan Bernegara dalam Landasan dan Konsep NKRI





Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “....dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”



BHINNEKA TUNGGAL IKA



UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang NKRI yaitu pasal:

- ✦ Pasal 1 ayat (1)
- ✦ Pasal 18 ayat (1)
- ✦ Pasal 18B ayat (2)
- ✦ Pasal 25A
- ✦ Pasal 35 ayat (5)





UUD 1945 PASAL 1 AYAT (1)

Pasal 1 ayat 1
berbunyi:
*"Negara Indonesia
Adalah Negara
Kesatuan Yang
Berbentuk Republik".*

- Artinya hanya ada satu Negara dan satu Pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam suatu pemerintahan yang disebut dengan bentuk pemerintahan republik.





UUD 1945 PASAL 18 AYAT (1)



Berbunyi : *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."*

Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mem-pertahankan bentuk negara kesatuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini sesuai dengan sejarah Indonesia, yakni asal muasal negara Indonesia adalah negara kesatuan.



UUD 1945 PASAL 18B AYAT (2)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Artinya: Persoalan tentang masyarakat hukum adat dan akan diatur secara khusus dengan satu undang undang atau setidaknya-tidaknya akan diatur dalam Undang Undang Pemerintah Daerah. Secara lokal diberbagai daerah telah ditetapkan berbagai Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tradisionalnya ini.

POLITICS



UUD 1945 PASAL 25A

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

- Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara kons-titusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.



UUD 1945 PASAL 37 AYAT (5)

"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."

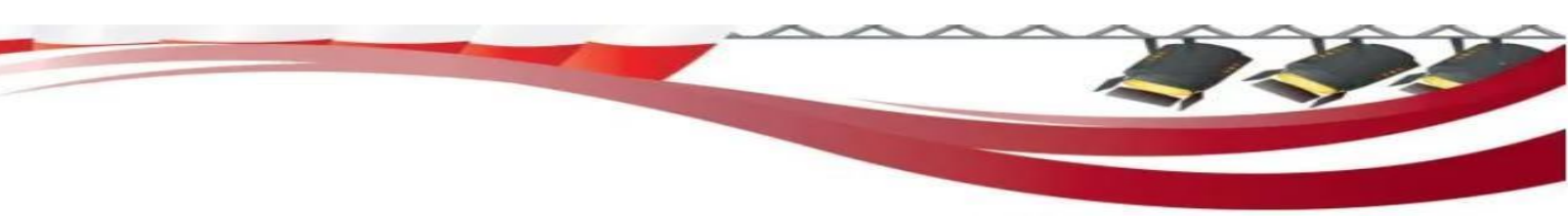
Pada intinya, ayat ini menjelaskan bahwa secara tegas dilarang merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia



Ketetapan MPR Tentang Wawasan Nusantara

1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973
2. TAP MRP Nomor IV/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang GBHN
3. TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983. Tujuan Pembangunan Nasional, yaitu :
 - kesatuan Politik
 - kesatuan Ekonomi
 - kesatuan Sosial Budaya
 - kesatuan Pertahanan Keamanan





SEKIAN..
TERIMA KASIH
